

**Kedudukan Saudara Kandung Sebagai Ahli Waris Dalam Peristiwa
Pewarisan (Analisis Terhadap Perkara No.30/Pdt.G/2010/PN.KDR, jo No.
265/Pdt/2011/PT.SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012)**

Widya Ayu Puspitasari,¹Suhariningsih,²Ulfa Azizah,³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: lia_chacha@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris serta menganalisis kesesuaian dasar hukum yang berlaku dengan dasar pertimbangan yang digunakan hakim majelis dalam memutus perkara no.30/Pdt.G/2010/PN.Kdr, jo No. 265/Pdt/2011/PT.SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang -undangan, konseptual, dan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami bahwa saudara kandung merupakan orang yang berhak atas harta warisan pewaris apabila pewaris tersebut tidak memiliki keturunan. Dalam kesesuaian dasar pertimbangan hakim ditemukan adanya unsur ketidakadilan pada tingkat banding. Hakim pada tingkat banding memutus dengan sepihak. Hal ini diketahui dari pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada serta pertimbangan hakim tersebut dinilai tidak tepat dan tidak benar oleh hakim Mahkamah Agung sehingga hakim Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.

Kata Kunci: Saudara Kandung, Ahli Waris, Peristiwa Pewarisan

¹ Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

² Dosen Pembimbing Utama dalam skripsi ini, Prof. Suhariningsih, SH,MS

³ Dosen pembimbing pendamping dalam skripsi ini, Ulfa Azizah, SH,MKn

**Position of Sibling as Heir at Inheritance Event
(Analysis toward the case no.30/Pdt.G/2010/PN.KDR,jo No. 265/Pdt/2011/PT.
SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012)**

Widya Ayu Puspitasari, Suhariningsih, Ulfa Azizah

Faculty of Law Brawijaya University

Email: lia_chacha@ymail.com

ABSTRACT

This research is aimed to know and understand the position of sibling as heir and to analyze the compatibility of basic law that occur and also basic consideration that used by council judges to decide the case no.30/Pdt.G/2010/PN.Kdr, jo No. 265/Pdt/2011/PT. SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012. This research is a kind of a normative reseach that conducted using statuory, conceptual and case approaches. The result of this research is to know and and understand that sibling is a person who had the right for the heir's property if he had no children. In consideration of the judge found that basic suitability of the elements are injustice at the appellate level. The appellate judges had decide unilaterally. It is known because of the judge's considerations are inappropriate with thr current law's fact and they are not true also inappropriate according to the supreme court so that supreme court support that the verdict on firts court is true and appropriate according to the current law.

keywords: sibling, heir, inheritance event

A. Pendahuluan

Berbicara tentang waris, pewarisan dapat terjadi karena adanya suatu kematian.⁴ Kematian dalam hal ini bisa berupa kematian baik yang disebabkan karena bencana alam, kriminalitas, atau sakit yang menimpa salah satu atau beberapa dari anggota keluarga tersebut dapat menimbulkan suatu persoalan waris yang menjadi persoalan hukum.

Mengenai perihal kewarisan terdapat suatu kasus di Jawa Timur khususnya daerah Kota Kediri mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas pengelolaan dan penguasaan tanah warisan oleh orang lain yang mana orang tersebut adalah bukan merupakan ahli waris yang sah. Para pihak baik dari penggugat maupun tergugat adalah beragama Islam dan kasus ini pun diajukan kepada Pengadilan Negeri Kediri.

Terdapat sepasang suami isteri bernama Bisri dan Kasripah yang memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 4300 m². Tanah tersebut dikelola berdua hingga meninggal dunia. sebelum meninggal dunia pasangan suami isteri ini memanggil Mrs. X untuk membantu merawat dan mengelola tanah tersebut karena pasangan suami isteri ini sudah cukup tua dan sedang sakit untuk mengelolanya sendiri. Bisri memiliki enam orang saudara kandung dan sebelas keponakan sedangkan Kasripah tidak memiliki saudara. Dari pernikahan pasangan suami isteri tersebut tidak dikaruniai keturunan.

Setelah pasangan suami isteri tersebut meninggal dunia, tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh Mrs. X selama kurang lebih 30 tahun. Ahli waris dari pihak Bisri merasa dirugikan dengan adanya Mrs. X yang mengelola dan

⁴ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, BPFE UII, Yogyakarta, 1998, hal 13

menguasai tanah tersebut karena tidak mendapatkan hasil dari pengeolaan lahan tersebut. Sehingga ahli waris dari Bisri mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Kediri dengan dasar gugatan bahwa Mrs. X telah mengelola dan menguasai tanah tersebut tanpa seijin dari ahli waris sehingga gugatan tersebut ialah gugatan perbuatan melawan hukum.

Dalam sidang perkara no.30/pdt.g/2010/PN.Kdr, Mrs. X sebagai Tergugat dan ahli waris sebagai Para Penggugat. Dari pembacaan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pihak Tergugat melakukan eksepsi dengan dalil bahwa ada kesalahan dalam kompetensi absolut, karena kedua belah pihak beragama islam dan hal ini adalah menyangkut hal waris sehingga menurut pihak Tergugat seharusnya gugatan ini dinyatakan kabur dan harus ditolak oleh PN Kediri. Namun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak oleh hakim karena gugatan yang diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum bukan perhal kewarisan.

Pada putusan perkara no. 30/pdt.g/2010/PN.Kdr hakim memutuskan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik ahli waris dan Mrs. X harus membayar ganti kerugian atas hal tersebut. Pihak tergugat belum puas dengan hasil sidang tersebut sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Dalam pertimbangan dan putusan hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya menimbang dan memutus bahwa Para Penggugat /Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil mengenai asal usul obyek sengketa tersebut sehingga dalam banding ini dimenangkan oleh pihak tergugat / Pembanding.

Setelah adanya putusan perkara no. 265/pdt/2011/PT/Sby, Para Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri sudah benar dan tepat namun putusan pada Pengadilan

Tinggi dirasa sepihak dan pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga Mahkamah Agung memutuskan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri no.30/pdt.g/2010/PN.Kdr dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi no.265/pdt/2011/PT.Sby.

Dengan demikian adanya perbedaan hasil putusan tentang perbuatan melawan hukum atas tanah warisan dan hak milik atas tanah tersebut yang telah terurai dalam pendahuluan penulis inilah yang akan dijadikan bahan ulasan dalam penelitian ini.

B. Masalah/Isu Hukum

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah/isu hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dalam peristiwa pewarisan pada putusan perkara No.30/Pdt.G/2010/PN.KDR, jo No. 265/Pdt/2011/PT.SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012?
2. Bagaimanakah kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perkara No.30 / Pdt.G / 2010 / PN.KDR, jo No. 265 / Pdt / 2011 / PT.SBY, jo No. 433 K / Pdt / 2012 dengan hukum yang berlaku saat ini ?

C. Pembahasan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pengkajian penerapan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma hukum positif.⁵ Bahan pustaka yang digunakan adalah berupa putusan pengadilan yang terdiri dari putusan perkara No.30/Pdt.G/2010/PN.Kdr. Jo.

⁵ Jhonny Ibrahim, *Theory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang 2007, hal 295

No. 265/Pdt/2011/PT.Sby. Jo. No. 433 K / pdt / 2012. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pada metode pendekatan perundang-undangan, akan dilakukan pendekatan terhadap KUH Perdata dan Kompilasi hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dengan penelitian ini. Untuk pendekatan konseptual yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶ Peneliti menggunakan pendekatan konseptual agar pada saat melakukan analisis penelitian tidak keluar dari apa yang dijadikan suatu norma atau aturan yang sudah ada, sehingga penelitian ini dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian pada pendekatan kasus, peneliti lebih menitikberatkan pada pengkajian kasus tentang putusan perkara no.30/Pdt.G/2010/PN.Kdr, jo No. 265/Pdt/2011/PT.SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012 tentang kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dalam peristiwa pewarisan.

Adapun tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan tersebut digunakan peneliti untuk menganalisis permasalahan dengan mengaplikasikannya dengan beberapa teknik analisis bahan hukum, yaitu dengan teknik analisis interpretasi atau penafsiran sistematis atau logis.

Setelah melalui tahapan penelitian dengan menggunakan metode penelitian diatas maka penulis dapat menemukan jawaban atas permasalahan

⁶Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, kencana, Jakarta, 2010, hal 177

yang ditemukan yaitu mengenai kedudukan saudara kandung dalam peristiwa pewarisan serta kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dengan hukum yang berlaku saat ini.

Dalam suatu perkawinan manusia sebagai makhluk sosial tentunya ingin memiliki suatu keturunan. Dari beberapa keturunan yang dilahirkan oleh pasangan suami isteri tersebut khalayak ramai ataupun sesuai aturan hukum yang sering disebut sebagai saudara kandung. Saudara kandung ialah anak yang dilahirkan dari sepasang suami isteri yang memiliki lebih dari satu orang anak, sedangkan anak ialah seseorang yang akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya⁷.

Untuk suatu perkembangan kehidupan yang dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan rasa aman dan nyaman. Untuk mencapai itu tentunya tidak hanya tercipta begitu saja tetapi melalui suatu proses yang dipengaruhi oleh kehidupan sekitarnya, umur manusia itu pun ada batasannya yang pada akhirnya akan mati. Hal ini disadari oleh individu manusia itu sendiri yang dirasa perlu untuk memiliki suatu keturunan, melestarikan budaya, adat, perilaku dalam menjaga perkembangan keturunan maupun harta benda yang ditinggalkan. Selain rasa ingin memiliki keturunan maupun harta peninggalan, rasa aman terhadap anak keturunan maupun harta yang ditinggalkan, dapat dirasakan apabila ada suatu ketentuan atau aturan baik yang berasal dari lingkungan setempat yang sering disebut hukum adat atau hukum kebiasaan yang apabila dilanggar maka akan memperoleh sanksi, sedangkan manusia yang beragama tentunya juga akan

⁷ D.Y. Witanto, Hukum Keluarga, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal 1

tunduk kepada syariat agama yang mengatur atas kehidupan anak keturunan dan harta yang ditinggalkan, sebagai warga negara yang taat dan patuh kepada hukum tentunya juga akan menghormati undang-undang maupun peraturan yang diberlakukan dimana ia bertempat tinggal.

a. Kedudukan Saudara Kandung Sebagai Ahli Waris Dalam Peristiwa Pewarisan Pada Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2010/PN.KDR, jo No. 265/Pdt/2011/PT.SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012

Dalam suatu peristiwa yang tengah menjadi pembahasan penelitian ini terdapat beberapa saudara kandung beserta keturunannya yang mana mereka adalah ahli waris dari almarhum Bisri. Para ahli waris Bisri mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kediri mengenai perbuatan melawan hukum atas tanah obyek sengketa yang diketahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan almarhum Bisri dan Kasripah seluas 4300 m² yang dalam hal ini mereka adalah pewaris.

Seperti halnya yang telah dijelaskan sekilas dalam pendahuluan bahwa permasalahan yang pertama ialah mengenai kedudukan saudara kandung dalam peristiwa pewarisan yang terdapat pada putusan perkara no.30/pdt.g/2010/PN.Kdr. pada gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menyatakn bahwa tanah tersebut adalah milik Bisri dan Kasripah selaku pewaris dan Para Penggugat adalah saudara kandung Bisri yang mana mereka adalah ahli waris karena dalam pernikahan Bisri dan Kasripah tidak dikaruniai keturunan sehingga Para Penggugatlah yang seharusnya berhak atas tanah obyek sengketa tersebut namun faktanya tanah obyek sengketa tersebut

dikuasai dan dikelola oleh Mrs. X selaku Tergugat dalam hal ini. Dalam pertimbangan hakim mengenai hal ini adalah bahwa Para penggugat dapat membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dengan menunjukkan beberapa bukti surat-surat yang menguatkan bahwa mereka adalah keluarga kandung Bisri dan merupakan ahli waris yang berhak atas tanah obyek sengketa. Sedangkan Mrs.X tidak dapat membuktikan bahwa dia memiliki hubungan darah dengan Bisri maupun Kasripah. sehingga hakim memutuskan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah atas tanah obyek sengketa. Kemudian selain daripada itu oleh karena tanah tersebut sebenarnya adalah hak dari Para Penggugat maka Mrs. X telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengelola dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin dari ahli waris yang sah.

Melihat dari keputusan yang diambil oleh hakim Tergugat tidak puas atas putusan tersebut sehingga mengajukan banding. Dalam putusan banding no. 265/pdt/2011/PT.Sby pun dinyatakan bahwa para penggugat/ para terbanding adalah ahli waris yang sah namun menurut hakim Pengadilan Tinggi Mrs. X tidak melanggar legitime portie yaitu bagian dari ahli waris karena Tergugat/Pembanding memperoleh hibah yang dilakukan secara lisan oleh pewaris. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Tergugat/Pembanding adalah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut.

Kemudian Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung. Dalam hal ini Mahkamah Agung menilai bahwa putusan pengadilan Negeri Kediri no.30/Pdt.G/2010/PN.Kdr adalah keputusan yang

benar dan tepat sesuai dengan peraturan yang ada. Namun pada tingkat Banding terdapat hal yang rancu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Jikalau Mrs. X memang benar mendapat hibah secara lisan, maka ia harus membuktikan dengan sebenar-benarnya. Pada kenyataannya pembuktian tersebut diragukan karena saksi yang digunakan oleh termohon kasasi adalah saudaranya sendiri. Hal ini melanggar aturan acara persidangan dalam HIR pasal 145 mengenai saksi yang tidak dapat di dengar. oleh karenanya pertimbangan hakim tersebut dianggap hanya keputusan sepihak dan tidak dibenarkan oleh hukum. Maka dari itu pada putusan perkara no.433 K/pdt/2012 dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi no.265/pdt/2011/PT.Sby dibatalkan dan menguatakan putusan Pengadilan Negeri Kediri no.30/pdt.g/2010/PN.Kdr.

Mengenai ketetapan saudara kandung sebagai ahli waris pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dibuktikan oleh Para Penggugat bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dengan menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat yang telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian menyerahkan bukti surat kematian atas nama Bisri,Kasripah,dan Anggota keluarga lain yang telah meninggal dan mereka juga merupakan ahli waris. Jika ditinjau dari segi pembagian warisan apabila melihat dari agama yang dianut adalah agama Islam maka penyelesaian warisnya juga menggunakan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam jika seseorang meninggal tanpa keturunan maka harta warisnya dilimpahkan kepada saudara kandungnya seperti halnya pada pasal 181 KHI telah dijelaskan bahwa apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan

ayah, maka saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila saudaranya lebih dari dua orang maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kediri no. 30/Pdt.G/2010/PN.Kdr sudah benar dan tepat karena telah memutus perkara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga putusan ini juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

b. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara No.30 / Pdt.G / 2010 / PN.Kdr, jo No. 265 / Pdt / 2011 / PT.Sby, jo No. 433 K / Pdt / 2012 Dengan Hukum Yang Berlaku Saat Ini

Pengkajian analisis dari kesesuaian dasar pertimbangan hakim dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung yang pertama ialah mengenai Eksepsi yang diajukan oleh tergugat perkara ini ialah dimana subyek hukumnya adalah orang beragama islam yang mana telah kita ketahui bahwa perkara yang subyek hukumnya adalah orang yang beragama islam dapat mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Namun dalam Pengadilan Agama sendiri juga ada batasan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili begitu juga di Pengadilan Negeri. Menurut pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 perubahan pertama atas UU No.7 tahun 1898 dan perubahan kedua atas UU No.50 tahun 2009 tentang peradilan agama yakni “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, antara, orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;

- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Infaq;
- g. Shadaqoh,dan;
- h. Ekonomi syari'ah;

Namun daripada itu, kewenangan Pengadilan Agama memang hanya diperuntukan untuk orang-orang yang beragama Islam, akan tetapi bidangnya juga hanya dalam lingkup pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 saja. Demikian juga dengan Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sendiri yakni diatur dalam pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Dalam pasal 50 ayat (1) UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Sedangkan dalam perkara ini, setelah dipelajari dengan teliti dan cermat tentang gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan posita dan petitum dari gugatan Para Penggugat, gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah obyek sengketa, yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah-tanah milik Para Penggugat. Sehingga benar dan tepat bahwa Hakim menolak eksepsi Kompetensi Absolut tersebut

Kemudian mengenai kepemilikan obyek sengketa. Pihak dari Para Penggugat mengajukan bukti-bukti akta otentik berupa foto copy Daftar Perhitungan Pengenaan Iuran Pembangunan Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah, dan juga 6 orang saksi. Sedangkan Tergugat mengajukan Surat Wajib Pajak Hasil Bmi, Surat Pemberitahuan pajak Ipeda, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan STTS, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah. Dalam hal kepemilikan tanah Surat Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah suatu alat bukti kepemilikan atas tanah karena surat tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Termuat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 undang-undang no 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, PBB merupakan pajak yang harus dibayar oleh orang atau

badan hukum yang memiliki hak dan menguasai tanah serta bangunan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.⁸

Pada pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi no.265/pdt/2011/PT.Sby telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terhadap pasal 1870 KUH Perdata juncto pasal 165 HIR. Pada pasal 1870 KUH Perdata juncto pasal 165 HIR kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna dan mengikat. Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta dan juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga Hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan oleh karenanya hakim Mahkamah Agung memberkan putusan yang tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi no.265/pdt/2011/PT.Sby mengenai pertimbangan bukti otentik tersebut.

Mengenai analisa tentang kesesuaian dasar pertimbangan *judex factie* pada Pengadilan Tinggi tentang membenarkan keterangan saksi tersebut terdapat ketidak sesuaian *judex factie* dalam Pengadilan Tinggi dengan hukum yang berlaku. Salah satu saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk menjadi saksi. Hal ini tercantum dalam pasal 145 H.I.R. jo. pasal 146 H.I.R. Sehingga hakim Mahkamah Agung juga membatalkan pertimbangan putusan mengenai hal ini.

⁸ <http://www.tarif.depkeu.go.id/?Bidang/bid=pajak&cat=pbb>

Beberapa pertimbangan dalam *Judex factie* tersebut dirasa tidak tepat dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yang mana keputusan tersebut hanya membela sepihak saja, sehingga keputusan hakim Mahkamah Agung dapat membatalkan seluruh putusan Pengadilan Tinggi no 265/pdt/2011/PT.Sby dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 30/pdt/2010/PN.Kdr dirasa sudah tepat dan benar serta memiliki kekuatan hukum tetap yang menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa tanpa hak dan tanpa seijin Para Penggugat merupakan suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum. Sehingga dari analisis dasar pertimbangan putusan No.30 / pdt.g / 2010 / PN.Kdr. jo No.433 k / Pdt / 2012 ternyata yang sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini dan yang tidak sesuai terdapat dalam putusan perkara Pengadilan Tinggi no.265/pdt/2011/PT.Sby.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian diatas, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam menelaah kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris pada putusan perkara No.30/pdt/2010/PN.Kdr, jo.No.265/pdt/2011/PT.Sby,jo. No. 433 k/pdt/2012 dapat kita ketahui bersama pada ulasan diatas, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bisri yaitu dengan memberikan bukti otentik kepada majelis hakim yaitu berupa surat keterangan ahli

waris dan juga bukti lainnya yang dapat menguatkan dalil Para Penggugat tersebut sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa.

- b. Meninjau dari kesesuaian dasar pertimbangan hakim dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung bahwa ada kesesuaian pendapat atau pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Agung yakni mengenai pembuktian kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dan pernyataan tentang menghukum tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan sehingga hasilnya adalah sesuai dengan fakta hukum yang ada dan dasar hukum yang berlaku saat ini.

2. Saran

- a. Alangkah baiknya bila para praktisi hukum baik Advokat, Hakim, ataupun instansi peradilan yang ada untuk lebih teliti dalam menelaah perkara-perkara yang sedang ditangani agar tidak salah dalam menerapkan hukumnya.
- b. Secara faktual kita harus melihat fakta hukum maupun konteks hukum yang terjadi, didalami dahulu barulah kita menentukan aturan hukum mana yang lebih dominan untuk digunakan menyelesaikan permasalahan tersebut diatas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azhar Basyir, Ahmad, Hukum Waris Islam, BPFE UII, Yogyakarta, 1998

Ibrahim, Jhonny, *Theory* dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang 2007

Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, kencana, Jakarta, 2010

D.Y. Witanto, Hukum Keluarga, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

Peraturan perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

UU No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.7 tahun 1989 peradilan agama

UU No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum

Internet

Tim Tarif Departemen Keuangan Republik Indonesia, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara <http://www.tarif.depkeu.go.id/?Bidang/bid=pajak&cat=pbb>